

USAHA PENINGKATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMASYARAKAT RUMBIO JAYA DESA KRATAI

Emilia Susanti, M.Pd.¹⁾, Fathir Muchtar²⁾, Annisa Mardhatillah³⁾, Mila Khorunisa⁴⁾,
Irfan Prasetyo⁵⁾, Alya Fitri Herianti⁶⁾

¹⁾Progam Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

²⁾Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

³⁾Panam,

^{1) 2) 3)}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Abstract (English)

This research examines efforts to increase civic values in society, with the aim of understanding and developing effective strategies in strengthening citizen awareness and participation. The main problem faced is the low level of community participation in civic activities, which is caused by a lack of understanding of the rights and obligations as citizens and a low level of concern for public issues. This research uses qualitative methods with a case study approach in several different communities. Data was collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The research results show that increasing civic values can be achieved through more inclusive and participatory civic education, as well as through community programs that encourage active citizen involvement. Findings also indicate that collaboration between government, non-governmental organizations and society is essential to create an environment conducive to the development of civic values. Additionally, information and communications technology (ICT) plays an important role in facilitating citizen engagement through digital platforms that enable broader discussion and participation. The conclusion of this research is that efforts to increase civic values in society require a multifaceted approach that integrates education, community participation, and the use of technology. This strategy has proven effective in building awareness, concern and active participation of citizens in public life, which in turn will strengthen democracy and social cohesion.

Article History

Submitted: 16 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

Published: 23 Juni 2024

Key Words

Efforts, improvement, citizenship.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini mengkaji upaya peningkatan nilai-nilai kewarganegaraan di masyarakat, yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan strategi efektif dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi warga negara. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewarganegaraan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta rendahnya rasa kepedulian terhadap isu-isu publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa komunitas yang berbeda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai-nilai kewarganegaraan dapat dicapai melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta melalui program-program komunitas yang mendorong keterlibatan aktif warga. Temuan juga mengindikasikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam memfasilitasi keterlibatan warga melalui platform digital yang memungkinkan diskusi dan partisipasi lebih luas. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa upaya peningkatan nilai-nilai kewarganegaraan di masyarakat memerlukan pendekatan multifaset yang mengintegrasikan pendidikan, partisipasi komunitas, dan pemanfaatan teknologi. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran,

Sejarah Artikel

Submitted: 16 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

Published: 23 Juni 2024

Kata Kunci

Usaha, peningkatan, kewarganegaraan.

kepedulian, dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi dan kohesi sosial.

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan tujuan meng-Amerikan bangsa Amerika dengan nama "Civics". Henry Randall Waite yang pada saat itu merumuskan pengertian Civics dengan "The science of citizenship, the relation of man, the individual in his relation to the state." Pengertian tersebut menyatakan bahwa ilmu Kewarganegaraan membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi(organisasi social ekonomi, politik) dengan individu-individu dan dengan negara.

Sedangkan di Indonesia, istilah civics dan civics education telah muncul pada tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan, civics pada tahun 1961 dan Pendidikan Kewarganegaraan negara pada tahun 1968. (Bunyamin dan Sapriya dalam Civicus, 2005:320). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968, namun pada tahun 1975 nama Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Moral Pancasila(PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Warga negara (citizen;citoyen) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (nation-state) di kenal sejak adanya perjanjian westphalia 1648 di eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintah dan lembaga - lembaga negara seperti lembaga dewan perwakilan rakyat, pengadilan, kepresidenan dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern istilah "warga negara" dapat berarti warga, anggota (member) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia istilah "warga negara" adalah istilah terjemahan dari bahasa Belanda. Staatsburger. Selain istilah staatsburger dalam bahasa Belanda di kenal pula istilah onderdaan. menurut soetoprawiro (1996), istilah onderdaan tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga di kenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari onderdaan.

Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern istilah kawula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kawula sudah tidak di gunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah "warga negara" dalam kepustakaan inggris di kenal dengan istilah "Civic", "citizen" atau "civicus". Apabila di tulis dengan mencantumkan "s" di bagian belakang kata Civic menjadi "Civics" berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. mereka dapat meliputi TNI,polri,petani,pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang

Menurut Nu'man Somantri dalam dikti (2014:7), Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, memiliki sifat humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Kendatipun adakalanya terjadi

konflik berupa tawuran, kerusuhan, atau perang antar suku bangsa, hal itu tidak mewakili karakter bangsa Indonesia melainkan karena situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhinya.

Nilai pendidikan hilang kewarganegaraan karena beberapa faktor. Pertama, kurikulum pendidikan sipil yang diterapkan tidak memadai dalam menanamkan nilai-nilai moral dan nasionalisme. Guru-guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan juga tidak memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga tidak efektif dalam mengembangkan karakter siswa. Kedua, perkembangan zaman telah mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat, sehingga nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang sebelumnya dianggap penting kini sulit diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, pendidikan Pendidikan sendiri tidak diberikan perhatian yang sungguh-sungguh oleh pemerintah, sehingga guru dan sekolah harus memikirkan sendiri bagaimana mengembangkan karakter siswa. Akibatnya, nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi beragama menjadi sulit ditanamkan pada generasi muda.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena adanya sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji oleh peneliti. Pendekatan kualitatif menurut Corbin dan Strauss (2015:5) dalam Wahidmurni (2017), merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data. Desain penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif, dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Prasanti, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka, Studi Pustaka yang dilakukan, yaitu dengan mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas guna memperoleh data serta informasi tertulis yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan. Menurut (Fadli, 2021), Studi pustaka (library research), pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Dalam proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif, dimana proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan kualitatif, proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.

Hasil Dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga Negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia.

Dimensi manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam kedudukan kita sebagai warga Negara Indonesia, hendaknya

dikembangkan secara seimbang. Dimensi manusia tersebut secara konsisten diperjelas dan dipertajam di dalam memandang dirinya sendiri dengan potensi diri pribadi, dan pengembangan kerjasama dengan orang lain untuk membawa keunggulan bangsa dan Negara, serta kepatuhannya untuk mematuhi norma-norma dalam masyarakat, dan aktualisasi dirinya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal itulah merupakan beberapa materi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, disamping materi-materi lainnya.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat inklusif juga menjadi perhatian bagi pemerintah desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bukit Kratai sebagian besar maish bersumber dari pendapatan transfer, pemerintah desa masih sangat terbantu dengan dana desa (DD), alokasi dana desa(ADD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti bantuan keuangan Provinsi, Bantuan keuangan Kabupaten, masun dari Kementrian. Adapun hasil dari pelaksanaan progam dan kegiatan yang telah dijalankan olrh pemerintah desa selama tahun anggaran 2023 antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bukit Kratai dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
2. Program percepatan penghapusan miskin ekstrem skala desa
3. Peningkatan kapasitas aparatur desa
4. Peningkatan pemberdayaan perempuan desa
5. Peningkatan keterampilan pemuda/pemudi desa
6. Rehabilitasi pasar desa
7. Peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum
8. Peningkatan kapasitas pengelolaa BUMdesa
9. Peningkatan kesejahteraan Kader-kader desa dan guru desa
10. Pngiatan Tahidzh skala desa
11. Beasiswa bagi anak didik berprestasi serta kurang mampu
12. Program dukungan percepatan penghapusan miskin eskترم
13. Program penguatan ketahanan pangan dan hewani skala desa

Dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan, dan pertahanan.

Program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa

Program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan kebudayaan dan keagamaan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, dan pembinaan kelembagaan masyarakat.

Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemeberdaayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

- a. Kebijakan dalam memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib,tentram dan dinamis,peningkatan kewaspadaaanterhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat

- b. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik secara formal maupun non formal
- c. Kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sektor pasar industri
- d. Kebijakan dalam mendukung upaya menngali dan menumbuh kembangkan budaya lokal
- e. Kebijakan dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
- f. Kebijakan dalam meningkatkan kinerja pembangunan DUSUN.

Berdasarkan pada visi dan misi desa yang dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan desa berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Bukit Kratai, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar dengan Slogan “ KITA WUJUDKAN EKOSISTEM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN”, maka pembangunan desa Bukit Kratai dari tahun 2021-2027 diorientasikan paa 5 (Lima) prioritas melalui peraturan desa Bukit Kratai Nomor 01 tahun 2022, tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2021-2027, yaitu:

1. Peningkatan Layanan dasar Masyarakat
2. Peningkatan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan sistem adminisgrasi desa
4. Peningkatan taraf ekonomi skala desa
5. Peningkatan fasilitas umum dan sosial masyarakat
6. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

KESIMPULAN

Dari berbagai kebijakan yang diterapkan di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rombio Jaya untuk meningkatkan nilai kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah memperkuat ikatan antara warga dengan negara serta membangun komunitas yang inklusif dan aktif dalam pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mencakup program-program seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewarganegaraan, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan lokal. Melalui upaya ini, masyarakat desa Bukit Kratai kecamatan rumbio jaya didorong untuk mengambil peran aktif dalam memajukan desa mereka, merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bersama, dan merasakan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai kewarganegaraan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmatnya sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih tulus juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya Emilia Susanti, M.Pd atas bimbingan nya dukungan dan arahannya yang sangat berharga sepanjang proses penulisan jurnal ini tanpa bimbingan dan nasehat beliau jurnal ini tidak akan tersusun dengan baik. Terimakasih juga kepada Desa Bukit Kratai Kecamatan Rombio Jaya , serta terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja sama dalam proses pembuatan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

Emilia Susanti, pendidikan kewarganegaraan, cahaya firdaus, jl. Kubang raya panam, 2019

Sugito dkk. 2002. Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT Mku UNNES

<https://www.neliti.com/id/publications/235045/pendidikan-kewarganegaraan-merupakan-salah-satu-pengejawantahan-dimensi-manusia>

Sunarso, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press

Budimansyah, D (ed). 2006, Pendidikan Nilai Moral dalam dimensi pendidikan Kewarganegaraan Bandung: Laboratorium PKN FPIPS UPI

Pasha, MK. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education). Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri